Pemprov Lampung Bahas Revisi APBD di Tengah Tantangan Resesi Ekonomi

Bandar Lampung-– Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Pembahasan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah, Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, (24-12-2025).

Rapat ini bertujuan untuk menghadapi tantangan ekonomi, terutama terkait dengan dampak resesi pada pendapatan dan belanja daerah. Menteri Dalam Negeri turut memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah provinsi dalam menjaga kestabilan keuangan daerah.

Menurut Marindo, pendapatan daerah Provinsi Lampung pada tahun ini masih berada di tengah-tengah dalam peringkat provinsi lain, namun ada waktu yang cukup untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang belum terealisasi.

 “Alhamdulillah, meskipun tantangan besar, kita berada di posisi 10 besar provinsi yang baik dalam melaksanakan resesi belanja,” ungkap Marindo.

Namun, Marindo menambahkan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian adalah posisi kas daerah, yang saat ini tergolong tipis.

 “Kita berada di peringkat ke-4, di antara 4 provinsi dengan posisi kas yang sangat terbatas. Ini berpengaruh langsung pada kemampuan kita untuk merealisasikan belanja daerah sesuai dengan rencana yang telah disusun,” jelasnya.

Marindo juga menyampaikan bahwa belanja yang telah menjadi tagihan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja lainnya akan segera direalisasikan, dengan harapan agar tidak ada yang tertunda.

”Kami akan menyesuaikan kembali dengan kondisi pendapatan daerah yang ada, dan berharap di akhir tahun ini pendapatan kita bisa terealisasi dengan baik, sehingga belanja-belanja dapat segera terealisasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan mengenai serapan anggaran.

 “Setiap pendapatan yang masuk pada hari itu, langsung disalurkan untuk tagihan-tagihan belanja yang sudah siap. Jadi, kas daerah memang sangat minim, karena apa yang masuk langsung keluar,” ujar Nurul.

Menurutnya, serapan anggaran untuk belanja dan pendapatan di Provinsi Lampung saat ini tercatat pada angka sekitar 83,5%, yang menunjukkan kinerja positif meski kondisi kas daerah masih sangat terbatas.

 “Pendapatan dan belanja kami memang tipis, jadi persentasenya hampir sama. Semua berjalan dinamis dan terus bergerak setiap saat,” tandas Nurul.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat terus mengoptimalkan pendapatan daerah dan merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sembari memastikan kestabilan keuangan daerah di tengah tantangan ekonomi global.